



**RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pematangsiantar ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Pada Tahun 2017 struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar yang meliputi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BKPD) Kota Pematangsiantar 2024 adalah :

1. Menyiapkan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2024.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematangsiantar.
3. Sebagai dasar tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar dirumuskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Yang menjadi tugas dan fungsi yang ingin diwujudkan sebagai instansi pemerintah, maka suatu instansi akan menjadi lembaga yang mampu mengatur irama kegiatan operasional, mengatur pengelolaan sumberdaya, mampu mengembangkan indikator kinerja dan cara pengukurannya. Disamping itu agar terselenggaranya *good government* (pemerintahan yang baik) tentunya diperlukan rencana yang baik pula dan itu merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas dan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemungutan sumber pendapatan daerah serta melaksanakan koordinasi pada unit kerja pengelola sumber pendapatan lainnya.
2. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah serta pemanfaatan sarana dan prasarana tugas.
3. Meningkatkan kinerja dengan melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pengembangan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan yang mencakup pendapatan, belanja serta pembiayaan.
5. Mewujudkan penetapan penganggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.
6. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan aset daerah agar sesuai dengan fungsinya.

Sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di sajikan pada Tabel TC-29 sebagai berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Pematangsiantar**

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2027		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)					Target program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Remstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)	
2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(7+9)		11= (10/4)
	Indeks IPKD	(40-43)	indeks	(40-43)	indeks	43-47	indeks	43-47	indeks	100	43-47	indeks	-	indeks	-
	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	14.54	Persen	14.88	Persen	14.88	Persen	14.88	Persen	100	14.88	Persen	-	Persen	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	-	Persen	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKYP	B	Predikat	0	Predikat	0	Predikat	0	Predikat	0	CC	Predikat	0	Predikat	0

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	5	Jumlah								5	Jumlah	0	Jumlah	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitasi Keuangan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tugas administrasi tambahan yang dibayar	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP/SPM yang diverifikasi	4.150	Jumlah	830	Jumlah	830	Jumlah	830	Jumlah	100	830	Jumlah	1.660	Jumlah	40,00
Pengelolaan dan Penyimpanan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK	10	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	100	2	Jumlah	4	Jumlah	40,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	65	Jumlah	13	Jumlah	13	Jumlah	13	Jumlah	100	13	Jumlah	26	Jumlah	40,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.650	Jumlah	530	Jumlah	530	Jumlah	530	Jumlah	100	530	Jumlah	1.060	Jumlah	40,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang dikelola	20	Jumlah	4	Jumlah	4	Jumlah	4	Jumlah	100	4	Jumlah	8	Jumlah	40,00
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Jasa Yang Dibayarkan Setiap Nya	40	Jumlah	8	Jumlah	8	Jumlah	8	Jumlah	100	8	Jumlah	16	Jumlah	40,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan jasa yang Dibayarkan Setiap	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	40 unit roda 4, 200 unit roda 2	Jumlah	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	Jumlah	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	Jumlah	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	Jumlah	100	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	Jumlah	16 unit roda 4, 80 unit roda 2	Jumlah	33,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain Nya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kntor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerahnya	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan kegiatan Pengelolaan Pendapatan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	35.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	100	7.000	Jumlah	14.000	Jumlah	40,00
Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	20 perwa dan 5 perda tentang pengembangan pajak daerah	Jumlah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	Jumlah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	Jumlah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	Jumlah	100	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	Jumlah	8 perwa dan 2 perda tentang pengembangan pajak daerah	Jumlah	33,33
Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	60 kegiatan sosialisasi, 180 baliho, 1800 tayang iklan radio 5 aplikasi upgrade smart	Jumlah	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	Jumlah	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	Jumlah	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	Jumlah	100	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	Jumlah	24 kegiatan sosialisasi, 72 baliho, 7.200 tayang iklan radio 2 aplikasi upgrade smart	Jumlah	100,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PBB dan BPTHTB, 5 Kegiatan Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	Jumlah	PBB dan BPTHTB, 1 Kegiatan Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	Jumlah	PBB dan BPTHTB, 1 Kegiatan Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	Jumlah	PBB dan BPTHTB, 1 Kegiatan Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	Jumlah	100	PBB dan BPTHTB, 1 Kegiatan Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	Jumlah	PBB dan BPTHTB, 2 Kegiatan Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	Jumlah	100,00
Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	35.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	100	7.000	Jumlah	14.000	Jumlah	40,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	35.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	100	7.000	Jumlah	14.000	Jumlah	40,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak daerah	500	Jumlah	100	Jumlah	100	Jumlah	100	Jumlah	100	100	Jumlah	200	Jumlah	40,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak	39105 SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 35315 SSPD (Surat Setoran)	Jumlah	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	Jumlah	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	Jumlah	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	Jumlah	100	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	Jumlah	15.642 SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 14.126 SSPD (Surat Setoran)	Jumlah	100,00

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	35.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	7.000	Jumlah	100	7.000	Jumlah	14.000	Jumlah	40,00
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	160 Milyar	Jumlah	32 Milyar	Jumlah	32 Milyar	Jumlah	32 Milyar	Jumlah	100	32 Milyar	Jumlah	64 Milyar	Jumlah	-
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	450 WP Terperiksa, 5000 reklame	Jumlah	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	Jumlah	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	Jumlah	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	Jumlah	100	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	Jumlah	180 WP Terperiksa, 2.000 reklame	Jumlah	100,00
	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	33,51	Persen	15,51	Persen	15,51	Persen	15,51	Persen	100	19,01	Persen	35	Persen	103,01
	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00

Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar Harga Yang Disusun	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	290	Jumlah	58	Jumlah	58	Jumlah	58	Jumlah	100	58	Jumlah	116	Jumlah	40,00
Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah	50	Jumlah	10	Jumlah	10	Jumlah	10	Jumlah	100	10	Jumlah	20	Jumlah	40,00
Penilaian Barang milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	100	2	Jumlah	4	Jumlah	40,00
Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	165 OPD , 140 UPB Puskesmas, 5 RSU, 670 UPB sekolah, 15 SK untuk penghapusan	Jumlah	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	Jumlah	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	Jumlah	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	Jumlah	100	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	Jumlah	66 OPD , 56 UPB Puskesmas, 2 RSU, 268 UPB sekolah, 6 SK untuk penghapusan	Jumlah	100,00
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang	290	Jumlah	58	Jumlah	58	Jumlah	58	Jumlah	100	58	Jumlah	116	Jumlah	40,00

	Milik Daerah														
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	95	Persen	19	Persen	19	Persen	19	Persen	100	19	Persen	38	Persen	40,02
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kaabupaaten/Kota	Jumlah Keperluan gedung/kantor Pemko Pematang Siantar, Jumlah Sertifikat Tanah milik Pemko	30 Bidang, 870 Sertifikat, 1.500 Jalan	Jumlah	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	Jumlah	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	Jumlah	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	Jumlah	100	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	Jumlah	12 Bidang, 348 Sertifikat, 600 Jalan	Jumlah	100,00
	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	200	Persen	200,00

	Presentase dok yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daer	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	50	Persen	10	Persen	10	Persen	10	Persen	100	10	Persen	19	Persen	38,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	10	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	100	2	Jumlah	4	Jumlah	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Yang Disusun	10	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	100	2	Jumlah	4	Jumlah	40,00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di verifikasi	165	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	100	33	Jumlah	66	Jumlah	40,00
Koordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	165	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	100	33	Jumlah	66	Jumlah	40,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	165	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	100	33	Jumlah	66	Jumlah	40,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	165	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	100	33	Jumlah	66	Jumlah	40,00

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah	50.000	Jumlah	10.000	Jumlah	10.000	Jumlah	10.000	Jumlah	100	10.000	Jumlah	20.000	Jumlah	40,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20	Jumlah	4	Jumlah	4	Jumlah	4	Jumlah	100	4	Jumlah	8	Jumlah	40,00
Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	620	Jumlah	124	Jumlah	124	Jumlah	124	Jumlah	100	124	Jumlah	248	Jumlah	40,00

	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya															
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00	

	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	100	12	Jumlah	24	Jumlah	40,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	450	Jumlah	90	Jumlah	90	Jumlah	90	Jumlah	100	90	Jumlah	180	Jumlah	40,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	165	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	33	Jumlah	100	33	Jumlah	66	Jumlah	40,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	15	Jumlah	3	Jumlah	3	Jumlah	3	Jumlah	100	3	Jumlah	6	Jumlah	40,00

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Terkonsolidasi	5	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	100	1	Jumlah	2	Jumlah	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupate/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupate/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	10	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	100	2	Jumlah	4	Jumlah	40,00
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	10	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	2	Jumlah	100	2	Jumlah	4	Jumlah	40,00
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupatean/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	450	Jumlah	90	Jumlah	90	Jumlah	90	Jumlah	100	90	Jumlah	180	Jumlah	40,00

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	5	Jumah	1	Jumah	1	Jumah	1	Jumah	100	1	Jumah	2	Jumah	40,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;
- b. pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas/tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- d. manajemen internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- f. asistensi terhadap Wali Kota dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya;

1. Sekretaris BPKPD

Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan;
- c. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan badan;
- d. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian :

1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;
2. mengarsipkan surat masuk dan keluar;
3. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor;
4. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat;
5. Membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administrasi dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
6. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;
7. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan :

1. menyusun rencana anggaran operasional badan;
2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendapatan I

Bidang Pendapatan I merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendapatan I yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan I mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang pendapatan yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran, penetapan, pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan pendapatan pajak daerah

- selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi daerah;
- b. pelaksanaan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah secara maksimal, serta terhadap sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah dan pemungutan-pemungutan lainnya yang telah ada;
 - d. pengoordinasian seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan asli daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;
 - f. perencanaan, penertiban, penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah;
 - g. perencanaan dan penyusunan kegiatan/program 1 (satu) tahun anggaran dalam hal pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola pendapatan pajak dan retribusi daerah;
 - h. pelaksanaan perencanaan pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun anggaran pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya yang ada dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola pendapatan asli daerah;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Pendapatan I adalah sebagai berikut:

- a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :
 - 1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan pendataan subjek pajak daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 2. melaksanakan perhitungan untuk persiapan penetapan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terhutang;

3. menghitung penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 4. mengoordinasikan pengisian SPTPD Pajak Daerah;
 5. mendata dan memetakan potensi wajib pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 6. mendaftarkan potensi wajib pajak daerah menjadi wajib pajak daerah; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendapatan I terkait tugas dan fungsinya.
- b. Subbid penetapan dan penagihan mempunyai tugas :
1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 2. mengoordinir pelaksanaan penagihan berdasarkan SSPD;
 3. mengoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan berdasarkan SSPD dan SSRD yang tidak tertagih;
 4. melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah yang telah menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan belum melunasi pemungutan/pembayaran/penyetorannya hingga waktu yang belum ditentukan;
 5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah pada SKPD pengelola retribusi daerah;
 6. Melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
 7. Menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran bagi surat permohonan angsuran yang disetujui;
 8. Mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 9. Mempersiapkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Perjanjian Angsuran Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran;
 10. Mempersiapkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Angsuran dan Tambahan; dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang pendapatan I terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendapatan II

- (I) Bidang Pendapatan II merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (II) Bidang Pendapatan II mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penyelenggaraan tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan pendapatan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. pelaksanaan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke kas daerah secara maksimal, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pemungutan-pemungutan lainnya yang telah ada;
 - d. Pengoordinasian seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;
 - f. Perencanaan, penertiban, penyelenggaraan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. Perencanaan dan penyusunan jadwal kegiatan/program 1 (satu) tahun anggaran dalam hal pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan pajak daerah;
 - h. pelaksanaan perencanaan pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun anggaran pajak daerah;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Pendapatan II adalah sebagai berikut:

- a. Subbid pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas :
 1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
 2. melaksanakan perhitungan untuk penetapan pajak daerah yang terhutang;

3. menghitung penetapan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan daerah;
 4. pelaksanaan penyampaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta menghimpun dan SPTPD;
 5. pelaksanaan penyampaian SPPT dan SKPD kepada wajib pajak;
 6. melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
 7. menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran bagi surat permohonan angsuran yang disetujui;
 8. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 9. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Perjanjian Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran;
 10. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Angsuran dan Tambahan; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendapatan II sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbid Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas :
1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 2. mengoordinir pelaksanaan penagihan;
 3. mengoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan;
 4. melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 5. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Pendapatan II terkait tugas dan fungsinya.

4. Bidang Anggaran

- (I) Bidang Anggaran merupakan unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur lini dalam pelaksanaan di bidang anggaran yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (II) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dalam bidang anggaran.

Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bantuan kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan di Bidang Anggaran;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan kebijakan di bidang pengelolaan anggaran;
- c. Sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memimpin Bidang Anggaran selaku Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- d. Persiapan program penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran sementara, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- e. Persiapan program penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- f. Perumusan pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- g. Penyiapan Nota Keuangan Rancangan APBD;
- h. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
- i. Pelaksanaan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran keuangan daerah;
- j. Pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang anggaran;
- k. Penetapan SKP yang dibawahinya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas:
 1. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta fungsi pengendalian pelaksanaan anggaran dalam hal ketersediaan anggaran secara periodik; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran terkait tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan pembiayaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran terkait tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan penetapan dan penerbitan SP2D, menguji kebenaran tagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina bendaharawan. Penyelenggaraan tugas dimaksud meliputi :

- a. penyelenggaraan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran maupun non anggaran yang menjadi tanggungjawab/kewenangan badan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan untuk penyusunan pedoman teknis dalam pengembangan pembinaan kegiatan perbendaharaan dan kas daerah;
- c. penyusunan pedoman dan pengendalian perbendaharaan dan kas;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan gaji;
- e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis administratif keuangan;
- f. menyelenggarakan fungsi pengendalian dalam proses pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan daerah;
- g. penyelenggaraan fungsi pengendalian dan penatausahaan selaku SKPKD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Kas Daerah dan Pembiayaan mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan untuk jenis belanja tidak langsung;
 2. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian penatausahaan keuangan selaku SKPKD;
 3. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan gaji; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perbendaharaan terkait tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran maupun non anggaran;
 2. menyusun pedoman dan pengendalian kas daerah;
 3. menyiapkan laporan pengelolaan kas harian, bulanan dan tahunan;
 4. mengumpulkan dan menyimpan bahan dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas dalam hal pembukuan keuangan daerah;

5. menyiapkan, melaksanakan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD;
6. melakukan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perbendaharaan terkait tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pencatatan akuntansi pendapatan dan belanja daerah, membuat laporan keuangan daerah dan meneliti laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan tugas tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas serta prosedur selain kas diluar prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
- b. pengendalian atas pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang menyangkut kegiatan akuntansi pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada setiap bulan, triwulan dan semester;
- e. pengoordinasian atas kelengkapan dokumen SPJ dan tata cara pembukuannya terhadap pelaksanaan APBD yang dikelola oleh Perangkat Daerah;
- f. pengoordinasian tata cara pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah;
- g. pembinaan dan pelaksanaan akuntansi pada unit Perangkat Daerah sebagai penggunaan anggaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Evaluasi dan Pembukuan mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas dalam kerangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan arus kas;

2. memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dari Perangkat Daerah; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi terkait tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan pendapatan daerah;
 2. menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan pembiayaan daerah;
 3. melakukan fungsi penyusunan laporan belanja daerah;
 4. menyusun laporan penerimaan / pengeluaran kas daerah, belanja dan pembiayaan daerah perbulan, triwulan, semester dan tahunan;
 5. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi terkait tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan analisa rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Penyelenggaraan tugas meliputi :

- a. pengoordinasian penyiapan konsep penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- b. penyelenggaraan analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. pengelolaan kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri atau pihak ketiga;
- d. pelaksanaan prosedur penatausahaan dan penilaian aset tetap;

- e. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat daerah yang menyangkut pengelolaan barang milik negara / daerah dan / atau akuntansi aset tetap;
- f. pengoordinasian penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengadaan tanah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendataan dan Aset Daerah :

1. melaksanakan tugas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemanfaatan, pengamanan dan penilaian;
2. melaksanakan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah untuk menghimpun ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. menghimpun seluruh hasil perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dari seluruh Perangkat Daerah dan disusun menjadi Buku Inventaris;
4. menghimpun seluruh laporan penggunaan barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing Perangkat Daerah dan membuat rekapitulasinya untuk disampaikan kepada Wali kota melalui pengelola;
5. membuat konsep Keputusan Walikota tentang kode lokasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah;
6. membuat konsep Keputusan Wali kota tentang penyimpanan barang dan pengurusan barang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
7. menyimpan dan memelihara Dokumen Aset Daerah;
8. melaksanakan Sertifikasi Aset Tanah Milik Daerah;
9. menyusun program kerja pengadaan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
10. memproses kegiatan pengadaan / pembebasan tanah untuk aset daerah dengan sertifikasinya serta penyerahan aset daerah dengan berita acara;
11. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan / fasilitas umum; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pemeliharaan, Perawatan dan Optimalisasi Aset :

1. menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan dan optimal aset dan/atau kekayaan daerah;
2. menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang pemanfaatan barang milik daerah yang meliputi pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna;
3. menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang pembentukan panitia penghapusan barang milik negara/daerah;
4. menghimpun daftar usulan penghapusan barang dari Perangkat Daerah dan menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang persetujuan atas barang yang akan dihapus dan selanjutnya membuat konsep penetapan pengelolaan atas nama Wali Kota tentang penghapusan barang milik daerah;
5. menyiapkan konsep Keputusan Wali Kota tentang pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
6. membantu majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi;
7. menghimpun dan mengevaluasi data harga barang dan jasa sebagai bahan di dalam menyusun Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kebutuhan penyusunan APBD; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*inpact*). secara umum indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah *input*, *output* dan *outcome*, sementara *benefit* dan *inpact* lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai hasil capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di sajikan pada Tabel T-C-30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pematangsiantar

ReNo	Indikator	SPM/Sandatr Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah								
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks IPKD			0	(43-47)	(47-52)	(52-57)	40-43	68.82	(43-47)	(47-52)	
2	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)			0	14.88	15.53	16.09	14.54	14,35	14.88	15.53	
3	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu			0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah			0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat			0	19,01%	22,51%	26,01%	15,51%	27,01%	19,01%	22,51%	
6	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai dengan SAP			0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;
2. Pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memoengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain dan atau instansi yang dikuasi kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
4. Manajemen internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.4. Permasalahan yang dihadapi BPKPD

Permasalahan yang dijumpai adalah Belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor antar lain :

1. Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan pada Stake holder maupun OPD lainnya sehingga terjadi keterlambatan dalam penganggaran maupun pengelolaan keuangan
2. Kapasitas Sumber daya aparatur yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
3. Lemahnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak seperti surat paksa, sulit untuk dilaksanakan.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pencapaian kinerja sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar RKPD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Pematangsiantar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah											
No	Rancangan Awal RKPD sesuai dengan Matriks Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 0000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		BPKPD	Indeks IPKD	43-47			BPKPD	Indeks IPKD	43-47		
		BPKPD	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	14.88			BPKPD	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	14.88		
		BPKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100			BPKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	4.237.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	4.237.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Cakupan kegiatan Pengelolaan Pendapatan	100	4.237.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Cakupan kegiatan Pengelolaan Pendapatan	100	4.237.000.000	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7000	40.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7000	40.000.000	
	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	52.000.000	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	52.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	400.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	400.000.000	

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	352.000.000			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	352.000.000
		Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7000	1.610.000.000			Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7000	1.610.000.000
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPD	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	7000	302.000.000			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPD	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	7000	302.000.000
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak daerah	100	151.000.000			Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak daerah	100	151.000.000
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.005.000.000			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.005.000.000
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	7000	110.000.000			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	7000	110.000.000
		Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	32 Milyar	107.000.000			Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	32 Milyar	107.000.000
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	108.000.000			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	108.000.000

			BPKPD	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	19,01				BPKPD	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	19,01	
			BPKPD	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100				BPKPD	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai dengan SAP	100	2.396.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai dengan SAP	100	2.396.000.000
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan BMD	100	2.396.000.000		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan BMD	100	2.396.000.000
		Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah strandar Harga Yang Disusun	1	420.000.000		Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah strandar Harga Yang Disusun	1	420.000.000
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	1	420.000.000		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	1	420.000.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	33 , 28 UPB Puskesmas	88.000.000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	33 , 28 UPB Puskesmas	88.000.000
		Pengamanan Barang Milik daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah	10	251.000.000		Pengamanan Barang Milik daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah	10	251.000.000
		Penilaian Barang milik Daerah	BPKPD	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	422.000.000		Penilaian Barang milik Daerah	BPKPD	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	422.000.000
		Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	343.000.000		Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	343.000.000

		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33, 28 UPB Puskesmas,	122.000.000			Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33, 28 UPB Puskesmas,	122.000.000
3		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun	1 BMD untuk LKPD	330.000.000			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun	1 BMD untuk LKPD	330.000.000
			BPKPD							BPKPD			
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	BPKPD	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	19,01	19.471.586.427			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	BPKPD	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	19,01	19.471.586.427
		Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BPKPD	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	19.471.586.427			Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BPKPD	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	19.471.586.427
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Keperluan gedung/kantor Pemko Pematang Siantar, Jumlah Sertifikat Tanah milik Pemko	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.471.586.427			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Keperluan gedung/kantor Pemko Pematang Siantar, Jumlah Sertifikat Tanah milik Pemko	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.471.586.427
			BPKPD	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100					BPKPD	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100	
			BPKPD	Presentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	100					BPKPD	Presentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,5	36.643.594.421			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,5	36.643.594.421

		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	1.861.706.579		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	1.861.706.579
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2	225.698.152		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2	225.698.152
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Yang Disusun	2	160.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Yang Disusun	2	160.000.000
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	BPKPD	Jumlah RKA SKPD yang di verifikasi	33	34.000.000		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	BPKPD	Jumlah RKA SKPD yang di verifikasi	33	34.000.000
		Koordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	33	34.000.000		Koordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	33 P	34.000.000
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	33	13.000.000		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	33	13.000.000
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33	13.000.000		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33	13.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	419.779.710		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	419.779.710
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	740.575.597		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	740.575.597
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	221.653.120		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	221.653.120
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	1.406.887.842		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	1.406.887.842

		Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah	10000	368.387.842			Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah	10000	368.387.842
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4	192.000.000			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4	192.000.000
		Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124	52.500.000			Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124	52.500.000
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	200.000.000			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	200.000.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	12	200.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	12	200.000.000
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	292.000.000		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	292.000.000
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	90	102.000.000		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	90	102.000.000
4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	1.275.000.000		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	1.275.000.000

		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	33	321.000.000			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	33	321.000.000
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	3	146.000.000			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	3	146.000.000
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Terkonsolidasi	1	368.000.000			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Terkonsolidasi	1	368.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupate/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2	200.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupate/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2	200.000.000
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	120.000.000			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	120.000.000

	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90	120.000.000		Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90	120.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	32.100.000.000		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	32.100.000.000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1	32.100.000.000		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1	32.100.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC	66.102.970.613		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC	66.102.970.613
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	22.000.000		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	22.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	5	22.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	5	22.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	59.443.276.213		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	59.443.276.213
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah gaji dan tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan	12	57.492.501.503		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah gaji dan tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan	12	57.492.501.503
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKPD	Jumlah tugas administrasi tambahan yang dibayar	12	1.610.774.710		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKPD	Jumlah tugas administrasi tambahan yang dibayar	12	1.610.774.710
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah SPP/SPM yang diverifikasi	830	200.000.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah SPP/SPM yang diverifikasi	830	200.000.000
	Pengelolaan dan Penyimpanan bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKPD	Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK	2	140.000.000		Pengelolaan dan Penyimpanan bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKPD	Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK	2	140.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD			3.580.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD			3.580.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	12	1.300.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	12	1.300.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12	80.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12	80.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	80.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	80.000.000
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	1.500.000.000		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	1.500.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	530	420.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	530	420.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah dokumen arsip yang dikelola	4	200.000.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah dokumen arsip yang dikelola	4	200.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			1.870.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			1.870.000.000
	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Jasa Yang Dibayarkan Setiap Nya	8	600.000.000		Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Jasa Yang Dibayarkan Setiap Nya	8	600.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Pelayanan jasa yang Dibayarkan Setiap	12	1.270.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Pelayanan jasa yang Dibayarkan Setiap	12	1.270.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			1.187.694.400		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			1.187.694.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	555.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	555.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain Nya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	12	174.500.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain Nya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	12	174.500.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kntor Dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	1	458.194.400		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kntor Dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	1	458.194.400
--	--	---	--------------	---	---	-------------	--	---	--------------	---	---	-------------

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelahaan untuk Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan dari kelompok masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak ada

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kota Pematangsiantar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Pematangsiantar yang mengacu pada Kebijakan Nasional adalah Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan Pengadaan dan Persertifikatan Tanah yang bertujuan untuk kepentingan publik/umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan sejalan dengan misi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar, adalah :

- a. Meningkatkan penerimaan daerah yang berkelanjutan.
- b. Menata proporsi anggaran yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan guna menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- c. Meningkatkan aplikasi sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur serta keandalan kualitas sarana dan prasarana tugas.
- e. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta terlaksananya pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah

2. Sasaran

Untuk menunjang Renja OPD sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Kota Pematangsiantar yang menitikberatkan arah pembangunan kepada potensi, sistem dan pengawasan serta kebijakan untuk meningkatkan seluruh Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah, maka sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar, adalah :

- a. Mewujudkan realisasi penerimaan daerah sesuai target APBD serta peningkatan yang berkelanjutan yang didukung dengan kelengkapan payung hukum Pengelolaan penerimaan daerah.
- b. Terciptanya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Tersedianya Aplikasi Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur serta keandalan kualitas sarana dan prasarana tugas.
- e. Terwujudnya proporsi anggaran yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan guna menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- f. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta terlaksananya pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
 - 2. Pencapaian target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar.
 - 3. Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 4. Terpenuhinya Standar Pelayanan Publik dalam penyediaan dan pemberian pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - 5. Adanya aplikasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan guna terwujudnya *Good Governance*.
 - 6. Pengelolaan anggaran guna pengembangan potensi ekonomi daerah.
 - 7. Peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya aparatur guna terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 8. Peningkatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Pematangsiantar.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

B. REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM DAN JUMLAH KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	SUB
	1		2		3		5	6		7	
	Meningkatkan tata kelola Keuangan, Pendapatan dan aset daerah	1	Indeks IPKD		Indeks IPKD		Indeks IPKD	1		Indeks IPKD	
			Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)		Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)		Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	2		Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerin-ah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerin-ah Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrase Keuangan	2	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan	
								3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tugas administrasi tambahan yang dibayar	
								4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP/SPM yang diverifikasi	
								5	Pengelolaan dan Penyimpanan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK	

								6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan
								7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan
								8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
								9	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
								10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi
								11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang dikelola
								12	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Jasa Yang Dibayarkan Setiap Nya
								13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan jasa yang Dibayarkan Setiap
		1						14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
								15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain Nya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara
								16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kntor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerahnya	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan kegiatan Pengelolaan Pendapatan	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

								2	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah
								3	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
								4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
								5	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
								6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya
								7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak daerah
		3						8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak
								9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
								10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

								11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
	Meingkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD		Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai dengan SAP	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah strandar Harga Yang Disusun
								2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah
								3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
								4	Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah
								5	Penilaian Barang milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
								6	Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah

								7	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
								8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keperluan gedung/kantor Pemko Pematang Siantar, Jumlah Sertifikat Tanah milik Pemko
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah		Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah		Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1		Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
			Presentase dok yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah		Presentase dok yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah		Presentase dok yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	1		Presentase dok yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah
		5	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun
								2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Yang Disusun

								3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di verifikasi
								4	Koordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi
								5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi
								6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
								7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
								8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
								9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah
								2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

								3	Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
								4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
								5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)

								6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
								7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban
								2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran
								3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Terkonsolidasi

								4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota
								5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
								6	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupatean/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
								7	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
								8	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak

c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Tidak ada

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 sebagai berikut

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTARKOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR					103.921.837.461,00						98.712.343.534,00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.666.302.291,00							19.862.965.314,00		
	2	1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					19.666.302.291,00							19.862.965.314,00		
1	2	1	0	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	% Tanah aset pemda yang bersertifikat	33,01%			22,51 %	19.666.302.291,00					29,51%	19.862.965.314,00		
	2	1	0	2.051	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	500Persen			100 Persen	19.666.302.291,00				Meningkatnya investasi daerah	Kota Pematang Siantar	100Persen	19.862.965.314,00	

	5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100Persen			100 Persen	57.037.708.975,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar	100Persen	60.637.086.065,00	
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	55.067.426.518,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		58.648.100.783,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.626.882.457,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		1.643.151.282,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

	2	1	2	3															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				830 SPP/SPM Dokumen	202.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		204.020.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
	2	1	2	6		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	141.400.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		141.814.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100persen		100 persen	3.615.800.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan investasi daerah	Kota Pematang Siantar	100persen	3.651.958.000,00	
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	2	1	6	2															

										12 Paket	1.313.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatnya investasi daerah	Kota Pematang Siantar		1.326.130.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	000															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		2	1	6	3															
										12 Paket	80.800.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		81.608.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	000															Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		2	1	6	4															
										12 Paket	80.800.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		81.608.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	

	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
	2	1	6	5							13 Paket	1.515.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		1.530.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	2	1	6	9							530 Laporan	424.200.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		428.442.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
	5	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
	2	1	6	0							4 Dokumen	202.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan	Kota Pematang Siantar		204.020.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.282.700.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		1.295.527.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terpeliharanya peralatan Barang Milik Daerah	12bulan	12 bulan	1.999.571.344,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar	12bulan	1.216.241.099,00	
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 unit roda 4, 40 un Unit	560.550.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		566.155.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	176.245.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		178.007.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	001																Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2	1	9	0		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	1.262.776.344,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		472.078.149,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
3	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7,5%		9 %		12.931.604.851,00							8%	4.586.234.856,00	

5	0	0	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	500Persen			100 Persen	1.812.317.889,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	100Persen	1.830.441.068,00	
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	227.955.134,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		230.234.685,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	161.600.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		163.216.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

	5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
		2	2	1	3						33 Dokumen	34.340.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	34.683.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
		2	2	1	7						1 Dokumen	423.977.507,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	428.217.282,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
		2	2	1	8						1 Dokumen	740.575.597,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan	Kota Pematang Siantar	747.981.353,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

						Penjabaran Perubahan APBD						PERJANJIAN KERJA		keuangan daerah				G SIANTAR
	5	0	0	2.0	000													Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		2	2	1	9				12 Dokumen	223.869.651,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		226.108.348,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
	5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	500Persen	100 Persen	1.420.956.720,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	100Persen	1.435.166.288,00	
	5	0	0	2.0	000													Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		2	2	2	1													

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10000 Dokumen	372.071.720,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	375.792.438,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	000														Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				4 Dokumen	193.920.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	195.859.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	000														Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelola				124 Dokumen	53.025.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	53.555.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	

								12 Laporan	202.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	204.020.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------	--	--	---	---	-----------------------	----------------	---

		2	2	2	1		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota			90 Orang	103.020.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		104.050.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	500	Persen	100 Persen	1.287.750.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	100	Persen	1.300.627.500,00	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,				33 Dokumen	324.210.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		327.452.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	

									2 Dokumen	202.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	204.020.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah											
		2	2	3	9				2 Dokumen	121.200.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	122.412.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
		2	2	3	1												

									30 Orang	121.200.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		122.412.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
	5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	8.410.580.242,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	-	20.000.000,00	
	5	0	0	2.0	000												Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	8.410.580.242,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

4	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menatausahaan asset sesuai dengan SAP	100%			100%	2.419.960.000,00					100%	2.444.159.600,00		
	5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	2.419.960.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar	-	2.444.159.600,00	
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Standar Harga														
						Jumlah Standar Harga yang Disusun					1Perwa standar BMD 1 Dokumen	424.200.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		428.442.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														

	5	0	0	2.0	000	Penilaian Barang Milik Daerah													
	2	3	1	8						2 Laporan	426.220.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	430.482.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
	2	3	1	0						33, 28 UPB Puskesmas Dokumen	346.430.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar	349.894.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	001	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
	2	3	1	1															

							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				33 , 28 UPB Puskesmas Laporan	123.220.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		124.452.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	001															Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 BMD untuk LKPD Laporan	333.300.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Kota Pematang Siantar		336.633.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
5	5	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% capaian pendapatan asli daerah	100%		100 %	4.279.370.000,00						100 %	4.322.463.400,00		
	5	0	0	2.0			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk	500Persen		100 Persen	4.279.370.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan	Kota Pematang Siantar	100Persen	4.322.463.400,00		

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 kegiatan sosialis Laporan	404.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		408.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														4
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				PBB dan BPTHTB BPHTB Unit	355.520.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		359.075.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
	5	0	0	2.0	000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														6
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				7000 Laporan	1.626.100.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		1.642.361.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	

5 0 0 2.0 000 2 4 1 7					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					7000 Obyek Pajak	305.020.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		308.070.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5 0 0 2.0 000 2 4 1 8					Penetapan Wajib Pajak Daerah															
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					100 Dokumen	152.510.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar		154.035.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5 0 0 2.0 000 2 4 1 9					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					7.821 SPTPD(Surat P Layanan	1.015.050.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan	Kota Pematang Siantar		1.025.500.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	90 WP Terperiksa, 1000 rekla Dokumen			90 WP Terperiksa, 10 Dokumen	109.080.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Kota Pematang Siantar	90 WP Terperiksa, 1000 rekla Dokumen	110.170.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR	
JUMLAH											103.921.837.461,00								98.712.343.534,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.10.02	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	BPKPD	100%	19.666.302.291,00	DAU
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerin- ah Daerah	BPKPD	100%	66.764.000.319,00	DAU
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKPD	100%	37.334.240.365,00	DAU
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai dengan SAP	BPKPD	100%	2.419.960.000,00	DAU
2.10.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerahnya	BPKPD	100%	4.279.370.000,00	DAU
	total				130.463.872.975,00	

BAB V

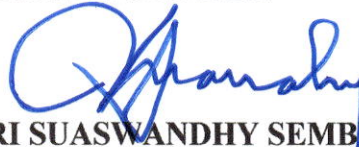
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar yang telah disusun ini telah diupayakan agar selalu konsisten dengan situasi, kompetensi, dan transparansi yang berlangsung hingga nantinya akan ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKP). Artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai fakta yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi atau perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pematangsiantar,
**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEMATANG SIANTAR**



**ARRI SUASWANDHY SEMBIRING, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19830429 2000112 1 001**